

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur yang ada di Kota Jakarta sudah cukup masif dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu. Pemerintah juga secara intensif mencitrakan Kota Jakarta sebagai Kota Pintar atau *Smart City* dengan melakukan transformasi tata letak kota dengan menyediakan konektivitas jalur pedestrian dengan efisien dan efektif dengan tujuan untuk memperlancar mobilitas warga (Medianti, 2022). Dalam peningkatan mobilitas warga, inklusivitas terhadap seluruh lapisan masyarakat seperti penyandang difabel menjadi salah satu faktor yang penting. Terkait hal ini, pemerintah juga dengan gencar melakukan revitalisasi infrastruktur di Kota Jakarta dengan menambahkan *guiding block* berwarna kuning untuk difabel tunanetra dan adanya *handrail* di tangga dan permukaan jalan yang rata untuk pengguna tongkat (Monica, 2024, h. 27). Dengan adanya aksesibilitas tersebut, para penyandang difabel seharusnya bisa bergerak secara mandiri dengan rasa aman dan tanpa ada rasa takut.

Namun, pada praktiknya, aksesibilitas tersebut dihalangi oleh adanya parkir liar yang memenuhi jalur pedestrian, pedagang kaki lima yang berjualan, bahkan pengendara bermotor juga akan memakai jalur pedestrian sebagai jalur alternatif jika terjadi sebuah kemacetan di suatu tempat (Nugraha et al., 2023, h. 944–945). Menurut Koalisi Pejalan Kaki, hampir 90% jalur pedestrian di Kota Jakarta masih disalahgunakan oleh parkir liar, pengendara bermotor, dan pedagang kaki lima (Al-Hamasy, 2026). Sedangkan, laporan penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada dari Satpol PP Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 menyatakan bahwa dari 274.043 kasus pelanggaran, terdapat 93.396 pelanggaran yang di mana 34% dari pelanggaran merupakan penyalahgunaan jalur pedestrian khusus difabel yang tercatat (Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, 2023, h. 3 & 5). Pemerintah Republik Indonesia sebenarnya sudah menciptakan aturan tegas mengenai hal tersebut yang tercantum di UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 131 Ayat (1) mengenai hak pejalan kaki, Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007, Pasal 25 Ayat (2) mengenai larangan

adanya pedagang kaki lima dan parkir liar yang menggunakan trotoar, dan UU No. 8 Tahun 2016, Pasal 97 & 98 mengenai jaminan infrastruktur bagi penyandang difabel. Pemerintah juga sudah memberikan himbauan secara persuasif berupa iklan layanan masyarakat mengenai aturan tersebut dan masyarakat sudah mengetahui akan aturan tersebut. Namun, iklan layanan masyarakat tersebut bersifat kaku dengan penggunaan bahasa yang formal, sehingga dibutuhkan strategi dalam penyampaian pesan dengan pendekatan yang berbeda untuk mengubah perilaku masyarakat (Kurnia et al., 2025, h. 67).

Perilaku penyalahgunaan jalur pedestrian ini tentunya akan membahayakan para pengguna, terutama kelompok rentan seperti penyandang difabel yang akan menimbulkan risiko secara fisik dan psikologis jika dibiarkan begitu saja. Hal tersebut juga dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Utami & Nugraheni (2025, h. 154) yang di mana ketika aksesibilitas dari jalur pedestrian tersebut dihalangi, maka penyandang difabel tidak memiliki pilihan selain turun ke aspal jalan raya yang meningkatkan risiko kecelakaan. Jalur pedestrian yang seharusnya aksesibel oleh para penyandang difabel menjadi area yang berbahaya yang menyebabkan tingkat kemandirian dari penyandang difabel juga akan menurun (Utami & Nugraheni, 2025, h. 152–153).

Maka dari itu, diperlukan sebuah upaya untuk mengubah perilaku masyarakat. Agar pesan tersebut bisa diterima, pendekatan satir tidak hanya menyasar terhadap kalangan tertentu, melainkan satir digunakan sebagai interupsi dari kebiasaan masyarakat yang telah dinormalisasi. Penggunaan satir dapat menjadi strategi komunikasi secara efektif dalam menyuarakan bentuk kritik terhadap realitas sosial yang ada dari berbagai lapisan masyarakat kalangan atas hingga bawah agar pesan yang kompleks dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat secara luas (Aprillia et al., 2025, h. 4325). Dengan adanya penggunaan satir dalam iklan layanan masyarakat, pesan yang disampaikan akan efektif dengan menyesuaikan kondisi sosial budaya dari masyarakat yang sudah ada (Rifqi & Rahmadi, 2025, h. 1131). Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan, penulis melakukan perancangan kampanye sosial interaktif mengenai penyalahgunaan jalur pedestrian khusus difabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut terdapat berbagai masalah yang ditemukan oleh penulis, yaitu:

1. Adanya tindak penyalahgunaan jalur pedestrian khusus difabel, seperti parkir liar, pengendara bermotor, dan pedagang kaki lima yang membahayakan para pengguna jalur pedestrian khusus difabel.
2. Meskipun sudah ada aturan tentang penggunaan jalur pedestrian khusus difabel yang disosialisasikan melalui iklan layanan masyarakat, tetapi penyampaiannya masih bersifat kaku dan menggunakan bahasa formal.

Oleh karena itu, penulis merumuskan pertanyaan penelitian berikut, yaitu bagaimana perancangan kampanye sosial interaktif mengenai penyalahgunaan jalur pedestrian khusus penyandang difabel?

1.3 Batasan Masalah

Perancangan ini dibatasi pada pembuatan kampanye sosial interaktif sebagai bentuk media persuasif. Target perancangan primer ditujukan kepada para pengguna kendaraan bermotor. Sedangkan, target perancangan sekunder ditujukan kepada para pengguna jalur pedestrian. Target perancangan primer dan sekunder berada di kategori dewasa pada rentang umur 20-30 tahun dengan SES B-C, serta tingkat pendidikan minimal SMA atau SMK. Perancangan kampanye sosial akan membahas seputar penyalahgunaan jalur pedestrian khusus para penyandang difabel, dengan tujuan untuk mengintervensi sikap abai (*ignorance*), mendorong tingkat kepatuhan (*compliance*), dan mengubah perilaku masyarakat (*behaviour change*) yang melakukan penyalahgunaan jalur pedestrian khusus difabel.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis melakukan perancangan kampanye sosial interaktif mengenai penyalahgunaan jalur pedestrian khusus penyandang difabel.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan Desain Komunikasi Visual, khususnya

dalam perancangan kampanye interaktif mengenai penyalahgunaan jalur pedestrian khusus penyandang difabel.

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini menjadi pedoman dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan Desain Komunikasi Visual, khususnya dalam pilar persuasi dengan melakukan perancangan media kampanye sosial interaktif. Selain itu, perancangan ini dapat menjadi acuan bagi penelitian yang serupa di masa depan yang membahas mengenai penyalahgunaan jalur pedestrian khusus penyandang difabel.

2. Manfaat Praktis:

Perancangan kampanye sosial interaktif ini diharapkan dapat membantu para penyandang difabel dalam melakukan aksesibilitas di jalur pedestrian dengan aman. Perancangan kampanye sosial interaktif ini juga dapat meningkatkan citra universitas dan berfungsi sebagai dokumen arsip Universitas Multimedia Nusantara.

